

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Adjie, Habib, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua, September 2015.
- _____, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT. Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Januari 2013.
- Andi, Rianto, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 2004.
- Apeldoorn, Van L.J., Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Cetakan ke 22, Jakarta, April 1985.
- Arisaputra, Ilham Muhammad Ilham, Reforma Agraria di Indonesia, Sinar Grafika Offset, Cetakan Pertama, Oktober 2015.
- Budiono, Herlien, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gunanegara, Hukum Administrasi Negara Jual Beli dan Pembebasan Tanah, Sejarah Pembentukan Hukum Pengadaan Tanah Indonesia, PT. Tatanusa Jakarta Indonesia, cetakan pertama, Juni 2016.
- _____, Hukum Pidana Agraria, Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman Hukum Pidana, PT. Tatanusa Jakarta-Indonesia, cetakan pertama, Februari 2017.
- Kie, Thong Tan, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Ketiga 2013.
- Limbong, Benhard, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Cetakan pertama, Februari 2012.
- Marzuki, Mahmud Peter, Penelitian Hukum (Jakarta:Pranada Media Group, 2005).
- Mazak, Hendrik Maray, Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Law Review Vol V, No.3, Maret 2006, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Narbuko, Cholid, Achmadi, Abu, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Santoso, Urip, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, edisi pertama copyright@2012.

_____, Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Januari 2016.

_____, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama, Copyright@2010.

_____, Perolehan Hak Atas Tanah, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Agustus 2015.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan XXXIm 2003.

Suhariningsih, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, cetakan pertama, Agustus 2009.

Sumardjono, S.W.Maria, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Buku Kompas, Cetakan kedua, Januari 2009.

Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika 2014, Cetakan ketujuh, Juni 2016.

_____, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Cetakan ketiga, Juni 2014.

Tukgali, Lianadevi Lieke, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Kertasputih Communication, Juni 2010, Cetakan Pertama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) & Amandemen Terlengkap Formasi Menteri Kabinet Kerja (2014-2019), Tim Anugrah.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban Dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar, 5 Maret 1998.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, 1 Pebruari 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar, 22 Januari 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kode Etik Notaris, INI, Citra Umbara Bandung, Cetakan II, September 2015.

C. Makalah/Majalah/Media Massa

Ahmad Rifai, Harian IndoPROGRESS, 24 Oktober 2016.

Detik News, 16 Pebruari 2013.

Fully Handayani Ridwan, Profesi Notaris, Materi Kuliah Tanggung Jawab Profesi.

Herry Rudolf Nahak, Implementasi Asan Equality Before The Law Dalam Proses Penyidikan Terhadap Notaris.

Kebijakan Tanah Terlantar-Kelompok 5 BPN RI.

Syafran Sofyan, Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Notaris, Majalah MINUTA terbitan Januari 2013.

Dewi Kartika, Resume Perlindungan Hukum Terhadap PPAT sebagai Tergugat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah 2015, Study Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.73/PDT.G/2014/PN.SON.

Ariwibowo Aditio, Sekilas Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli, 25 Juli 2013.

Setyawati Amelia, Kecakapan Hukum, 3 Desember 2008.

D. Website/Internet/Jurnal

Suara Merdeka.com

[http://.scrip.com/doc/62212279/Pengalihan-Hak-Atas Tanah Terlantar-Dengan Studi-Kasus.](http://.scrip.com/doc/62212279/Pengalihan-Hak-Atas_Tanah_Terlantar-Dengan-Studi-Kasus)

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2016/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>

Widhihandoko bin Yuri, Kegiatan Pendaftaran Tanah, Juni 27, 2014, <http://widhihandoko.com/?p=623>

Sumatera Utara Universitas, Prosedur Peralihan Hak Guna Usaha Melalui Perikatan Jual Beli Sekaligus Alih Fungsi Penggunaan Tanah, <http://repository.usu.ac.id>

